



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/KEPMEN-KP/2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA LINGKUP PUSAT KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa sehubungan pergantian pimpinan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127/KEPMEN-KP/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Lingkup Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Lingkup Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA LINGKUP PUSAT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada kolom 3 selaku penanggung jawab kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana tersebut pada kolom 4 dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 sampai dengan ditetapkannya kegiatan yang baru.
- KETIGA : Dalam hal terdapat perbedaan sebagian kegiatan pada kolom 4 dapat ditunjuk lebih dari satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditugaskan menyelesaikan bagian pekerjaan, sesuai prosedur yang berlaku.
- KEEMPAT : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 tercantum dalam DIPA dengan nama Satuan Kerja sebagaimana tercantum pada kolom 5.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127/KEPMEN-KP/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Lingkup Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 128/KEPMEN-KP/2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA LINGKUP
 PUSAT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN ANGGARAN 2015

PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PUSAT YANG DIJABAT OLEH ESELON II DEFINITIF

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
I	Sekretariat Jenderal			
1.		Kepala Biro Perencanaan	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Monev Pembangunan KKP	Biro Perencanaan
2.		Kepala Biro Kepegawaian	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP	Biro Kepegawaian
3.		Kepala Biro Keuangan	Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP	Biro Keuangan
4.		Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP	Biro Hukum dan Organisasi
5.		Kepala Biro Umum	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP	Biro Umum

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
6.		Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga Bidang Kelautan Perikanan	Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga
7.		Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan Perikanan	Pusat Data, Statistik, dan Informasi
8.		Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan	Dewan Kelautan Indonesia
II	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut			
1.		Direktur Perencanaan Ruang Laut	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
2.		Direktur Jasa Kelautan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCD-IFAD)
3.		Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
			Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang-CTI
III	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap			

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2.		Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	Direktorat Sumber Daya Ikan
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	COREMAP-CTI Project Ditjen Perikanan Tangkap
3.		Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4.		Direktur Pelabuhan Perikanan	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Direktorat Pelabuhan Perikanan
5.		Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
6.		Direktur Kenelayanan	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan	Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
IV	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya			
1.		Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
2.		Direktorat Kawasan Budidaya	Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	Direktorat Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya
3.		Direktur Perbenihan	Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
4.		Direktur Pakan	Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	Direktorat Produksi Perikanan Budidaya
5.		Direktur Produksi dan Usaha Budidaya	Pengelolaan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Direktorat Usaha Perikanan Budidaya
6.		Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya
V	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			
1.		Direktur Akses Pasar dan Promosi	Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pemasaran Luar Negeri
2.		Direktur Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pengolahan Hasil
3.		Direktur Sistem Logistik	Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pemasaran Dalam Negeri
4.		Direktur Pengembangan Investasi	Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan Perikanan	Direktorat Usaha dan Investasi
VI	Inspektorat Jenderal			
1.		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan	Inspektorat Jenderal

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
2.		Inspektur I	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP	Inspektorat Jenderal
3.		Inspektur II	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	Inspektorat Jenderal
4.		Inspektur III	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP	Inspektorat Jenderal
5.		Inspektur IV	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP	Inspektorat Jenderal
6.		Inspektur V	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu Pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V	Inspektorat Jenderal
VII	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)			
1.		Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
2.		Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
3.		Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
4.		Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Direktorat Kapal Pengawas
5.		Direktur Penanganan Pelanggaran	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Direktorat Penanganan Pelanggaran
VIII	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			
1.		Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP)	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP)
		Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan Budidaya	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya
2.			Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
3.		Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir	Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika, dan Sumber Daya Laut dan Pesisir	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
4.		Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
5.		Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
IX	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan			
1.		Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPSDM KP	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2.		Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
3.		Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
4.		Kepala Pusat Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Pusat Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
X	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM dan KHP)			
1.		Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM dan KHP)	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM dan KHP)
2.		Kepala Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan	Pusat Karantina Ikan
3.		Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
4.		Kepala Pusat Standardisasi Kepatuhan, dan Kerja Sama	Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Pusat Manajemen Mutu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 128/KEPMEN-KP/2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA
 LINGKUP PUSAT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015

PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PUSAT YANG DIJABAT OLEH PELAKSANA TUGAS (PLT)

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
I	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut			
1.		Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	Sekretariat Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
2.		Plt. Direktur Pendayagunaan Pesisir	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Direktorat Pesisir dan Lautan
3.		Plt. Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
II	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			
1.		Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

No	UNIT ESELON I	PEJABAT ESELON II	KEGIATAN DALAM DIPA	SATUAN KERJA DALAM DIPA
1	2	3	4	5
2.		Plt. Direktur Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan	Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan	Direktorat Pengembangan Produk Non Konsumsi
III	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)			
		Plt. Direktur Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur	Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

